



DINAS
PETERNAKAN
PROVINSI
JAWA TIMUR



LAPORAN KINERJA

2018

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai tujuan dan sasaran yang dibebankan kepada Dinas Peternakan dalam kurun waktu tahun 2018. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan pula pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018.

Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran serta hasil yang diperoleh pada tahun 2018 ini berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Capaian kinerja pada tahun 2018 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di tahun-tahun mendatang.

Surabaya, 25 Pebruari 2019
Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Timur

Drh. WEMMI NIAMAWATI, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19610119 198903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.5 PERAN STRATEGIS DINAS PETERNAKAN	9
BAB II. PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2014-2019	12
2.1.1 TUJUAN	12
2.1.2 SASARAN	13
2.1.3 PROGRAM PEMBANGUNAN	14
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	16
2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN	17
2.4 PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
3.1.1 CAPAIAN KINERJA	19
3.1.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN DAN SOLUSI	21
3.1.3 ANALISA PENGGUNAAN SUMBER DAYA DAN ANGGARAN	23
3.2 REALISASI ANGGARAN	25
3.3 PRESTASI TAHUN 2018	28
BAB IV. PENUTUP	29
4.1 KESIMPULAN	29
4.2 REKOMENDASI	30

LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Matrik Renstra 2014-2019
LAMPIRAN II	Perjanjian Kinerja Tahun 2018
LAMPIRAN III	Ringkasan Pengukuran Kinerja Tahun 2018
LAMPIRAN IV	Perhitungan Produksi Peternakan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Tabel 2.2	:	Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran
Tabel 2.3	:	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Tabel 2.4	:	Rencana Kinerja Tahun 2018
Tabel 3.1	:	Pencapaian Kinerja meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan Tahun 2018
Tabel 3.2	:	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
Tabel 3.3	:	Perbandingan Realisasi Provinsi dengan Realisasi Nasional
Tabel 3.4	:	Alokasi Anggaran Per Sasaran
Tabel 3.5	:	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.6	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.7	:	Realisasi Anggaran Tahun 2018

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikannya dalam Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal penting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan demikian Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur diharapkan semakin meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari penggunaan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan.

Perlu disampaikan bahwa tahun 2017, dilakukan Perubahan Renstra 2014-2019 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur seiring dengan Perubahan RPJMD 2014-2019 Provinsi Jawa Timur dengan pertimbangan :

- a. perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur, sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah
- b. Adanya perubahan kebijakan nasional, yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP tersebut memberikan konsekuensi perubahan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu masukan dalam

menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

a) Kedudukan

Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

b) Tugas

Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian dan tugas pembantuan.

c) Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan,

hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- k. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perbibitan, pakan, dan produksi peternakan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perbibitan, Pakan, dan Produksi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis perbibitan, pakan, dan produksi peternakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan yang terdapat pada lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;

- d. Pengawasan mutu benih/bibit ternak dan pakan ternak di lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pengendalian peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Penyediaan dan pengendalian peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dan ke daerah provinsi lain;
 - g. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbibitan, pakan dan produksi peternakan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Kepala Bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan hewan Lainnya, membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan Peternakan
 - b. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan
 - c. Seksi Produksi dan Budidaya Ternak
4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan hewan;
 - b. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas daerah Provinsi;
 - d. Pemberian rekomendasi penerbitan izin kesehatan hewan pada ternak hewan, hewan kesayangan, hewan liar, hewan konservasi serta telur tetas dari dan ke wilayah Provinsi;

- e. Pembinaan dan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;
- f. Pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan di daerah Provinsi;
- g. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan hewan;
- h. Pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan;
- i. Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pelaku usaha obat hewan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :

- a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Kesehatan Hewan
 - b. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - c. Seksi Pengawasan Peredaran Obat Hewan
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kesmavet mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penerapan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi, pengujian dan pengawasan mutu produk hewan;
 - d. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas daerah provinsi, pengawasan praktek hygiene sanitasi dan biosekuriti produsen produk hewan;

- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan tindak karantina lalu lintas produk hewan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk hewan di pos pemeriksaan hewan/produk hewan (*check point*);
 - g. Pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis sertifikasi kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan;
 - h. Pemberian rekomendasi penerbitan izin laboratorium kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi serta pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. Pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit usaha produk hewan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan produk hewan;
 - j. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 - k. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
- a. Seksi Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produk Hewan
 - b. Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan
 - c. Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
6. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha peternakan;

- c. Pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan/ investasi usaha agribisnis peternakan;
 - d. Pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas peternakan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan harga komoditi peternakan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh peternakan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;
 - h. Pelaksanaan pembinaan pengembangan pasar hewan dan pengawasan tataniaga hasil peternakan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Peternakan
 - b. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan
 - c. Seksi Investasi Usaha dan Kelembagaan Peternak
7. Unit Pelaksana Teknis
 8. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 - a. Medik Veteriner
 - b. Paramedik Veteriner
 - c. Pengawas mutu bibit ternak
 - d. Pengawas mutu pakan ternak
 - e. Instruktur Inseminasi Buatan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, terdiri dari :

1. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jember
2. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Malang
3. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu
4. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kediri
5. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Magetan
6. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Tuban
7. UPT Inseminasi Buatan di Surabaya
8. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban
9. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang
10. UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan di Madura

1.5. PERAN STRATEGIS DINAS PETERNAKAN

Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging, telur, dan susu. Protein hewani bermanfaat dalam pertumbuhan sel dan jaringan serta cadangan energi tubuh. Hingga kini pemenuhan protein hewani tidak dapat digantikan dengan zat yang lain.

Jumlah konsumsi protein hewani selama ini dinilai masih kurang dari nilai konsumsi protein hewani standar Pola Pangan Harapan (PPH). Tingkat konsumsi protein hewani di Indonesia hanya 4,7 gr/orang/hari. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang rata-rata 10 gr/orang/hari. Dengan demikian usaha peternakan masih berpotensi untuk dikembangkan.

Subsektor Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, yaitu mencakup perunggasan (misalnya ayam dan itik), ruminansia kecil (misalnya kambing dan domba), ruminansia besar (misalnya sapi dan kerbau), dan aneka ternak (misalnya kelinci). Disamping itu, juga termasuk produk turunannya seperti daging, susu, dan telur.

Subsektor peternakan Provinsi Jawa Timur sangat berpengaruh secara nasional. Populasi sapi potong Jawa Timur mencapai 28 % dari populasi nasional. Sapi potong Jawa Timur diekspor ke beberapa Provinsi lain, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Produksi hasil peternakan Jawa Timur juga menjadi andalan di tingkat nasional. Produksi susu segar di Jawa Timur mencapai

55 % dari total produksi nasional; produksi telur 30 % dari produksi telur nasional; dan produksi daging sapi 19 % dari produksi nasional.

Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Undang-undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tersebut. Karena itu Rumah Potong Hewan juga harus memenuhi standart Nomor Kontrol Veteriner. Saat ini dari 134 RPH Ruminansia di Jawa Timur masih sedikit atau baru 11 RPH yang ber-NKV. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai penerbit NKV sangat berkepentingan agar semua RPH di Jawa Timur dapat memenuhi standar tersebut.

Kendala pembangunan peternakan saat ini adalah kapasitas sumber daya manusia yang terbatas (kebanyakan bukan pekerjaan utama tetapi merupakan pendukung sektor pertanian) dan teknologi. Masyarakat peternak perlu difasilitasi dan dibina dalam upaya meningkatkan kualitas budidaya, pemberian nilai tambah komoditas peternakan, dan diversifikasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk peternakan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak. Kendala lain adalah masih banyak beredar produk hasil peternakan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan serta ancaman kematian ternak karena penyakit hewan menular.

Peranan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan antara lain sebagai penyusun kebijakan teknis, pembinaan, dan pengawasan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan dalam rangka mempertahankan Jawa Timur sebagai barometer peternakan nasional antara lain :

1. Penerbitan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 mengenai larangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan kuantitas bibit ternak yang pada akhirnya berpengaruh terhadap populasi.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 524/8838/023/2010 tanggal 30 Juni 2010 mengenai larangan pemasukan dan peredaran sapi, daging, dan jerohan impor sehingga diharapkan tidak ada lagi produk peternakan impor masuk ke Jawa Timur.

3. Surat Edaran Kepala Dinas Peternakan Nomor 524.3/7306/115.02/2012 mengenai pembatasan pengeluaran ternak sapi dari Provinsi Jawa Timur untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran ternak sapi serta pemenuhan kebutuhan ternak untuk masyarakat di Jawa Timur.

BAB II. PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2014-2019

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Pembangunan subsektor peternakan yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Jawa Timur dilaksanakan melalui 14 (empat belas) program prioritas, yaitu : (1) Program Peningkatan Produksi Peternakan; (2) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan; (3) Program Penjaminan Kesehatan Hewan; (4) Program Peningkatan Produk Hewan yang ASUH; (5) Program Pembibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan; (6) Program Pembibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri; (7) Program Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT dan HMT Jember; (8) Program Pembibitan Ternak Kambing di UPT PT dan HMT Malang; (9) Program Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu; (10) Program Pembibitan Terbak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban; (11) Program Pembibitan Ternak Sapi Madura di UPT PT dan Keswan Madura; (12) Program Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan; (13) Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Malang; (14) Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Tuban. Untuk mendukung program diatas, maka telah ditetapkan tujuan pembangunan peternakan Provinsi Jawa Timur.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kedua Gubernur terpilih yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agribisnis/agroindustri, dan industrialisasi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan

“ Meningkatkan kontribusi subkategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur “

Indikator Tujuan

“ Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) “

Tabel 2.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2019)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kontribusi subkategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur	Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	2,01	2,94

2.1.2. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun (2015 – 2019) , dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

Tujuan : Meningkatkan kontribusi subkategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasarnya adalah Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan

Tabel 2.2 Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN	
				2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kontribusi subkategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur	Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan	Persentase pertumbuhan produksi 1.daging 2.telur 3.susu	2,5% 2,2% 2,0%	2,5% 2,2% 2,0%
			Persentase nilai tambah produk olahan 1.daging sapi 2.telur 3.susu	25% 20% 40%	25% 20% 40%

2.1.3. PROGRAM PEMBANGUNAN

Pembangunan peternakan merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan.

Program pembangunan peternakan di RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 14 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Produksi Peternakan.

Kegiatan-kegiatan pada program Program Peningkatan Produksi Peternakan diarahkan untuk menghasilkan peningkatan produksi hasil ternak on farm, yaitu produksi daging, produksi telur, dan produksi susu yang merupakan komoditas unggulan peternakan

2. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan.
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan peningkatan nilai tambah produk olahan hasil ternak daging sapi, telur, dan susu.
3. Program Penjaminan Kesehatan Hewan.
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk melaksanakan aspek-aspek kesehatan hewan yang meliputi pengamatan, pencegahan, dan pengendalian kesehatan hewan serta menjamin kesehatan hewan yang masuk dan keluar provinsi.
4. Program Peningkatan Produk Hewan yang ASUH.
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar.
5. Program Pembibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan.
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan produksi bibit ayam buras.
6. Program Pembibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri.
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan produksi bibit itik mojosari.
7. Program Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT dan HMT Jember.
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan bibit domba sapudi yang layak bibit.
8. Program Pembibitan Ternak Kambing di UPT PT dan HMT Malang.
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan bibit kambing yang layak bibit.
9. Program Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu.
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan bibit sapi perah yang layak bibit.
10. Program Pembibitan Ternak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban.
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan bibit sapi PO yang layak bibit.
11. Program Pembibitan Ternak Sapi Madura di UPT PT dan Keswan Madura.
Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk menghasilkan bibit sapi Madura yang layak bibit.
12. Program Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan.

Kegiatan-kegiatan pada Program ini diarahkan untuk menghasilkan kelahiran sapi hasil Inseminasi Buatan dan untuk mendukung program pemerintah Upaya Khusus Sapi Betina Wajib Bunting

13. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Malang.

Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk memberikan layanan surveillance, pengawasan, dan pengujian penyakit hewan dan produk hewan sebagai pendukung kegiatan Bidang Kesehatan Hewan.

14. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Tuban.

Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk memberikan layanan surveillance, pengawasan, dan pengujian penyakit hewan dan produk hewan sebagai pendukung kegiatan Bidang Kesehatan Hewan.

Untuk program rutin perkantoran sebagai pendukung program pembangunan terdiri atas 4 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah pada tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kontribusi subkategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur	Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan	Persentase pertumbuhan produksi 1.daging 2.telur 3.susu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase nilai tambah produk olahan	Persentase nilai tambah produk olahan 1.daging sapi 2.telur 3.susu

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Renstra yang merupakan penjabaran rencana kinerja lima tahunan selanjutnya diuraikan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Target kinerja RKT menyesuaikan dengan perkembangan kondisi tahunan, sehingga tidak sama dengan Renstra. Rencana Kinerja Tahun 2018 adalah pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan	Persentase pertumbuhan produksi 1.daging 2.telur 3.susu	2,5% 2,2% 2,0%
		Persentase nilai tambah produk olahan 1.daging sapi 2.telur 3.susu	25% 20% 40%

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Perjanjian kinerja antara Gubernur dan Kepala Dinas Peternakan dapat dilihat pada lampiran.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur :

Tujuan : Meningkatkan kontribusi subkategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

Sasaran : Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI*	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan	Persentase pertumbuhan produksi 1.daging 2.telur 3.susu	2,5% 2,2% 2,0%	13,56% 3,5% 3,64%	542% 159% 182%
		Persentase nilai tambah produk olahan 1.daging sapi 2.telur 3.susu	25% 20% 40%	25% 20% 40%	100% 100% 100%

*) angka sementara

Berdasarkan Tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi (1) daging dapat mencapai target dengan tingkat capaian 542%, (2) telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 159%, dan (3) susu dapat mencapai target dengan tingkat capaian 182%. Perhitungan persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan

indikator kinerja persentase nilai tambah produk olahan (1) daging sapi mencapai target dengan tingkat capaian 100%, (2) telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100%, dan (3) susu dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100%.

Tabel 3.2.
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2019)	REALISASI TAHUN 2018	TINGKAT Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan	Persentase pertumbuhan produksi 1.daging 2.telur 3.susu	2,5% 2,2% 2,0%	13,56% 3,5% 3,64%	542% 159% 182%
		Persentase nilai tambah produk olahan 1.daging sapi 2.telur 3.susu	25% 20% 40%	25% 20% 40%	100% 100% 100%

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan : persentase pertumbuhan produksi (1) daging melebihi target RPJMD dengan tingkat kemajuan 542%, (2) telur melebihi target RPJMD dengan tingkat kemajuan 159%, dan (3) susu melebihi target RPJMD dengan tingkat kemajuan 182%. Sedangkan indikator persentase nilai tambah produk olahan dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan : persentase nilai tambah produk olahan (1) daging sapi mencapai target RPJMD dengan tingkat kemajuan 100%, (2) telur mencapai target RPJMD dengan tingkat kemajuan 100%, dan (3) susu mencapai target RPJMD dengan tingkat kemajuan 100%.

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Provinsi dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI NASIONAL*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan	Persentase pertumbuhan produksi 1.daging 2.telur 3.susu	13,56% 3,5% 3,64%	3,63% 6,61% (1,99%)
		Persentase nilai tambah produk olahan 1.daging sapi 2.telur 3.susu	25% 20% 40%	- - -

*) angka sangat sementara, sumber : Kementerian Pertanian

Berdasarkan Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi dibandingkan dengan nasional menunjukkan : persentase pertumbuhan (1) produksi daging lebih tinggi dibandingkan dengan produksi nasional, (2) produksi telur lebih tinggi dibandingkan dengan produksi nasional, dan (3) produksi susu lebih tinggi dibandingkan dengan produksi nasional yang mengalami penurunan.

3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas, diketahui bahwa capaian indikator kinerja mengalami keberhasilan. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan antara lain :

- 1) Persentase pertumbuhan produksi daging, telur, dan susu melebihi target hal ini dikarenakan pada tahun 2018 terjadi peningkatan produksi daging terutama yang berasal dari komoditas ternak ayam ras pedaging. Selain itu khusus produksi daging dipengaruhi juga oleh peningkatan permintaan daging ayam

baik di dalam wilayah Jawa Timur maupun permintaan dari luar provinsi sehingga pemotongan ternak ayam meningkat untuk memenuhi permintaan daging ayam dari luar provinsi.

- 2) Persentase nilai tambah produk olahan daging sapi, telur, dan susu mencapai target hal ini dikarenakan pembinaan kepada kelompok pengolahan pasca panen, fasilitasi aksesibilitas permodalan dan promosi hasil pengolahan pasca panen.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian diperlukan langkah – langkah strategis kedepan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan usaha peternakan berbasis kawasan, sehingga dapat fokus pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- b. Memfasilitasi aksesibilitas permodalan untuk mengembangkan usaha ternak, baik melalui koperasi, bank pemerintah, atau lembaga pembiayaan lainnya.
- c. Memberikan penyuluhan *good farming practice* secara berkala kepada para peternak.
- d. Mendatangkan ternak indukan impor yang berkualitas.
- e. Mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolah pakan skala kecil.
- f. Memberantas wabah penyakit ternak, melalui program pemberian vaksin, ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah penyakit. Disamping itu perlu meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak/ produk ternak.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak dengan cara inseminasi buatan.
- h. Mengadakan alat pengolah pasca panen bagi usaha peternakan skala kecil.
- i. Kerjasama dengan lembaga penelitian peternakan untuk mengembangkan teknologi peternakan di masyarakat.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tersebut didukung oleh program pembangunan peternakan diantaranya program peningkatan produksi peternakan, program pengembangan agribisnis peternakan, program penjaminan kesehatan hewan, program peningkatan produk hewan yang ASUH,

program pembibitan ayam buras di UPT PT dan HMT Magetan, program pembibitan itik mojosari di UPT PT dan HMT Kediri, program pembibitan ternak domba sapudi di UPT PT dan HMT Jember, program pembibitan ternak kambing di UPT PT dan HMT Malang, program pembibitan ternak sapi perah di UPT PT dan HMT Batu, program pembibitan ternak sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban, program pembibitan ternak sapi madura di UPT PT dan HMT Madura, program peningkatan kelahiran hasil Inseminasi Buatan, program pelayanan laboratorium kesehatan hewan Malang dan program pelayanan laboratorium kesehatan hewan Tuban

3.1.3. Analisis Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.4.
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan	Persentase pertumbuhan produksi 1.daging 2.telur 3.susu	43.325.886.000	45,5
		Persentase nilai tambah produk olahan 1.daging sapi 2.telur 3.susu	2.800.000.000	2,9

Tabel 3.5.
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan	Persentase pertumbuhan produksi 1.daging 2.telur 3.susu	 2,5% 2,2% 2,0%	 13,56% 3,5% 3,64%	 542% 159% 182%	43.325.886.000	39.505.534.798	91,18%
		Persentase nilai tambah produk olahan 1.daging sapi 2.telur 3.susu	 25% 20% 40%	 25% 20% 40%	 100% 100% 100%	2.800.000.000	2.688.115.425	96,00%

Tabel 3.6.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan	Persentase pertumbuhan produksi 1.daging 2.telur 3.susu	294,33	91,18	203,15
		Persentase nilai tambah produk olahan 1.daging sapi 2.telur 3.susu	100	96,00	4,00

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 914/191.P/203.2/2018 tanggal 9 Oktober 2018, realisasi anggaran tahun 2018 dirinci pada tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Realisasi Anggaran Tahun 2018

Kode Rekening					Uraian			Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1					2			3	4	5
3	200	0	0				PENDAPATAN DAERAH	7.255.888.200	10.661.767.162	146,94
3	200	0	0				BELANJA DAERAH	95.173.219.575	87.743.094.632	92,19
3	200	0	0	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.057.039.575	28.989.409.137	93,34
3	200	0	0	2			BELANJA LANGSUNG	64.116.180.000	58.753.685.495	91,64
3	200	1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.304.679.400	4.038.215.758	93,81
3	200	1	19				<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	4.304.679.400	4.038.215.758	93,81
3	200	2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.998.154.250	6.495.813.153	92,82
3	200	2	12				<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	4.379.121.650	3.985.073.088	91,00
3	200	2	31				<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	2.619.032.600	2.510.740.065	95,87
3	200	7					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	4.510.637.350	4.115.406.254	91,24
3	200	7	1				<i>Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah</i>	2.950.140.000	2.627.189.700	89,05
3	200	7	2				<i>Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah</i>	1.560.497.350	1.488.216.554	95,37
3	200	8					Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	2.176.823.000	1.910.600.107	87,77
3	200	8	1				<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	738.264.000	613.634.880	83,12
3	200	8	2				<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>	552.759.000	472.618.745	85,50
3	200	8	3				<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	778.000.000	724.274.243	93,09
3	200	8	4				<i>Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan</i>	107.800.000	100.072.239	92,83
3	200	39					Program Peningkatan Produksi Peternakan	21.400.886.000	18.598.926.271	86,91
3	200	39	3				<i>Budidaya ternak</i>	2.500.000.000	2.199.450.937	87,98
3	200	39	22				<i>pengawasan mutu bibit ternak</i>	2.500.000.000	2.053.093.209	82,12
3	200	39	35				<i>Penataan Kawasan Agropolitan/Minapolitan Jawa Timur</i>	1.400.886.000	1.230.522.020	87,84
3	200	39	37				<i>Pembinaan dan pengawasan mutu pakan, penerapan teknologi pakan, dan penyaluran benih HPT</i>	1.386.000.000	1.298.913.450	93,72

3	200	39	41					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat melalui usaha peternakan kelompok tani ternak	704.410.000	694.469.725	98,59
3	200	39	42					bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat melalui bantuan budidaya ternak	9.295.590.000	7.857.168.130	84,53
3	200	39	43					bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat melalui bantuan HPT/Alsin Peternakan	3.614.000.000	3.265.308.800	90,35
3	200	42						Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	2.800.000.000	2.688.115.425	96,00
3	200	42	148					Pengolahan produk hasil peternakan	500.000.000	490.699.350	98,14
3	200	42	149					Informasi pasar dan promosi	700.000.000	675.339.550	96,48
3	200	42	150					Investasi usaha dan penguatan kelembagaan kelompok peternak	1.300.000.000	1.237.669.350	95,21
3	200	42	151					Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Peternakan	300.000.000	284.407.175	94,80
3	200	63						Program Penjaminan Kesehatan Hewan	3.500.000.000	3.292.875.331	94,08
3	200	63	1					Pengamatan penyakit hewan menular dan penguatan kelembagaan kesehatan hewan	1.000.000.000	931.341.283	93,13
3	200	63	2					Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis	2.000.000.000	1.900.585.712	95,03
3	200	63	3					Pengawasan obat hewan	500.000.000	460.948.336	92,19
3	200	64						Program Peningkatan Produk Hewan yang ASUH	3.500.000.000	3.374.628.692	96,42
3	200	64	1					Penerapan jaminan keamanan pangan	1.000.000.000	974.035.228	97,40
3	200	64	2					Pengawasan lalu lintas dan peredaran produk hewan	1.500.000.000	1.437.411.945	95,83
3	200	64	3					Pengawasan, pengendalian zoonosis dan kesejahteraan hewan	1.000.000.000	963.181.519	96,32
3	200	65						Program Pembibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan	1.550.000.000	1.512.194.715	97,56
3	200	65	1					Produksi bibit ayam buras dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Magetan	674.500.050	666.806.705	98,86
3	200	65	2					Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak ayam buras UPT PT dan HMT Magetan	34.150.000	33.582.750	98,34
3	200	65	3					Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Magetan	841.349.950	811.805.260	96,49
3	200	66						Program Pembibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri	1.220.000.000	1.212.324.200	99,37
3	200	66	1					Produksi itik mojosari dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Kediri	730.000.000	726.443.200	99,51
3	200	66	2					Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak itik mojosari UPT PT dan HMT Kediri	60.000.000	57.589.000	95,98
3	200	66	3					Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Kediri	430.000.000	428.292.000	99,60
3	200	67						Program Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT dan HMT Jember	1.210.000.000	1.199.470.510	99,13
3	200	67	1					Produksi bibit domba sapudi dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Jember	906.520.700	899.571.510	99,23
3	200	67	2					Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak domba sapudi UPT PT dan HMT Jember	63.739.300	63.120.000	99,03
3	200	67	3					Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Jember	239.740.000	236.779.000	98,76

3	200	68						Program Pembibitan Ternak Kambing di UPT PT dan HMT Malang	1.210.000.000	1.192.231.669	98,53
3	200	68	2					Produksi bibit kambing dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Malang	600.000.000	591.138.269	98,52
3	200	68	3					Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak kambing UPT PT dan HMT Malang	30.000.000	29.612.000	98,71
3	200	68	4					Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Malang	580.000.000	571.481.400	98,53
3	200	69						Program Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu	1.370.000.000	1.348.105.922	98,40
3	200	69	1					Produksi bibit sapi perah dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Batu	786.384.700	785.424.512	99,88
3	200	69	2					Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi perah UPT PT dan HMT Batu	22.050.000	21.244.500	96,35
3	200	69	3					Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Batu	561.565.300	541.436.910	96,42
3	200	70						Program Pembibitan Ternak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban	1.370.000.000	1.362.910.467	99,48
3	200	70	1					Produksi bibit sapi PO dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Tuban	671.890.000	667.702.775	99,38
3	200	70	2					Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi PO UPT PT dan HMT Tuban	20.280.000	20.095.000	99,09
3	200	70	3					Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Tuban	677.830.000	675.112.692	99,60
3	200	71						Program Pembibitan Ternak Sapi Madura di UPT PT dan Keswan Madura	1.815.000.000	1.738.019.390	95,76
3	200	71	1					Produksi bibit sapi madura dan hijauan makanan ternak UPT PT dan Keswan Madura	652.788.500	638.386.590	97,79
3	200	71	2					Surveillance, pemeriksaan, dan pengujian penyakit hewan dan produk hewan di wilayah Madura	168.521.500	161.244.150	95,68
3	200	71	3					Pelaksanaan administrasi UPT PT dan Keswan Madura	993.690.000	938.388.650	94,43
3	200	72						Program Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan	2.880.000.000	2.480.432.289	86,13
3	200	72	1					Pelayanan inseminasi buatan	2.200.000.000	1.856.161.997	84,37
3	200	72	2					Bioteknologi reproduksi	340.000.000	313.298.250	92,15
3	200	72	3					Pelaksanaan administrasi UPT Inseminasi Buatan	340.000.000	310.972.042	91,46
3	200	73						Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Malang	1.085.000.000	1.012.313.595	93,30
3	200	73	1					Surveillance, pemeriksaan, dan pengujian penyakit hewan di wilayah kerja 18 kab/ kota	200.000.000	182.546.800	91,27
3	200	73	2					Surveillance, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan di wilayah kerja 18 kab/ kota	190.000.000	181.110.750	95,32
3	200	73	3					Pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Keswan Malang	695.000.000	648.656.045	93,33
3	200	74						Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Tuban	1.215.000.000	1.181.101.747	97,21
3	200	74	1					Surveillance, pemeriksaan, dan pengujian penyakit hewan di wilayah kerja 16 kab/ kota	177.111.300	175.206.350	98,92
3	200	74	2					Surveillance, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan di wilayah kerja 16 kab/ kota	170.477.500	166.569.200	97,71
3	200	74	3					Pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Keswan Tuban	867.411.200	839.326.197	96,76

3.3. PRESTASI TAHUN 2018

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur senantiasa berkomitmen untuk memajukan pembangunan peternakan di Jawa Timur, dibuktikan dengan aparatur Dinas, kelompok ternak, dan petugas teknis seleksi Provinsi memperoleh prestasi tingkat nasional di tahun 2018, dengan kategori sebagai berikut :

- a. Juara I petugas Inseminator berprestasi tingkat nasional untuk wilayah Inseminasi Buatan (IB) swadaya, bapak Sukiyono dari Kabupaten Situbondo;
- b. Juara I petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) tingkat nasional untuk wilayah yang dominan IB, bapak Nur Rahmad dari Kabupaten Probolinggo;
- c. Penghargaan realisasi terbanyak se Indonesia program Asuransi untuk Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K);

BAB IV. PENUTUP**4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian sasaran dalam mencapai tujuan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan kontribusi subkategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
- Sasaran : Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan
1. Indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi (1) daging, (2) telur, dan (3) susu, dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Persentase pertumbuhan produksi (1) daging dapat mencapai target dengan tingkat capaian 542%, (2) telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 159%, dan (3) susu dapat mencapai target dengan tingkat capaian 182%.
 - b. Persentase pertumbuhan produksi dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan persentase pertumbuhan produksi (1) daging melebihi target RPJMD dengan tingkat kemajuan 542%, (2) telur melebihi target RPJMD dengan tingkat kemajuan 159%, dan (3) susu melebihi target RPJMD dengan tingkat kemajuan 182%.
 - c. Persentase pertumbuhan produksi dibandingkan dengan tingkat nasional menunjukan persentase pertumbuhan (1) produksi daging lebih tinggi dibandingkan dengan produksi nasional, (2) produksi telur

lebih tinggi dibandingkan dengan produksi nasional, dan (3) produksi susu lebih tinggi dibandingkan dengan produksi nasional.

2. Indikator kinerja persentase nilai tambah produk olahan (1) daging sapi, (2) telur dan (3) susu, dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Persentase nilai tambah produk olahan (1) daging sapi dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100%, (2) telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100%, dan (3) susu dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100%.
 - b. Persentase nilai tambah produk olahan dibandingkan dengan target RPJMD menunjukkan persentase nilai tambah produk olahan (1) daging sapi mencapai target RPJMD dengan tingkat kemajuan 100%, (2) telur mencapai target RPJMD dengan tingkat kemajuan 100%, dan (3) susu mencapai target RPJMD dengan tingkat kemajuan 100%.

4.2 REKOMENDASI

Dalam rangka mempetahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Peternakan pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan usaha peternakan berbasis kawasan, sehingga dapat fokus pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- 2) Memfasilitasi aksesibilitas permodalan untuk mengembangkan usaha ternak, baik melalui koperasi, bank pemerintah, atau lembaga pembiayaan lainnya.
- 3) Memberikan penyuluhan *good farming practice* secara berkala kepada para peternak.
- 4) Mendatangkan ternak indukan impor yang berkualitas.
- 5) Mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolah pakan skala kecil.
- 6) Memberantas wabah penyakit ternak, melalui program pemberian vaksin, ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah penyakit. Disamping itu perlu meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak/ produk ternak.

- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak dengan cara inseminasi buatan.
- 8) Mengadakan alat pengolah pasca panen bagi usaha peternakan skala kecil.
- 9) Kerjasama dengan lembaga penelitian peternakan untuk mengembangkan teknologi peternakan di masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2018 dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
					2018	
1	2	3	3	4	6	7
1.	Meningkatkan kontribusi subkategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur	Meningkatnya produksi komoditas utama dan unggulan peternakan	(1) Presentase pertumbuhan produksi 1. daging 2. telur 3. susu	2,5% 2,2% 2,0%	13,56% 3,50% 3,64	542% 159% 182,00%
			(2) Persentase nilai tambah produk olahan 1. daging sapi 2. telur 3. susu	25% 20% 40%	25% 20% 40%	100% 100% 100%

Perhitungan Produksi Peternakan

1. Jawa Timur

No	Produksi	Jumlah (Ton)		Peningkatan produksi (2018)		Capaian (%)	Tingkat kemajuan
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi		
1	Daging	478.091	542.935 *	2,5%	13,56%	542%	542%
2	Telur	521.759	540.026 *	2,2%	3,50%	159%	159%
3	Susu	502.711	521.030 *	2,0%	3,64%	182%	182%

*) angka sementara

2. Nasional

No	Produksi	Jumlah (Ton)		Perbandingan Jawa Timur dengan Nasional		Peningkatan produksi
		Tahun 2017	Tahun 2018	2017	2018	
1	Daging	3.467.598	3.593.499 *	13,78%	15,10%	3,63%
2	Telur	2.089.997	2.228.326 *	24,96%	24,23%	6,61%
3	Susu	928.108	909.638 *	54,16%	57,27%	(1,99%)

*) angka sangat sementara

**DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Jend A Yani 202

Telp. (031) 8292545-8280445-8285126

Fax. 8291853 - 8287165,

email : disnak@jatimprov.go.id

Surabaya